

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1.1 Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan dan sosial negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder) tentang kondisi keuangan pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya – tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu periode.

Menurut (Mamduh 2009), Laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industry, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan reliabilitas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - unndangan (Ayuningtyas 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II paragraph 17 dinyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Pada Paragraf 23 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam

pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi,
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah harus bermanfaat dan informasi tersebut harus mempunyai nilai. Kriteria dan unsur – unsur pembentuk kualitas yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, terdiri dari: a) relevan, b) andal, c) dapat dibandingkan dan d) dapat dipahami.

Pada Lampiran II SAP (Paragraf 33-37) dijelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan Dapat dipahami oleh penggunanya.

#### **2.1.1.2 Pemerintah Daerah**

Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan (Ayuningtyas 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri atas pemerintah pusat maupun daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang menyediakan mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan serta memiliki kualitas setiap laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### 2.1.2 Sumber daya manusia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sumber daya manusia adalah potensi yang ada pada manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia atau manusia menjadi unsure utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa – apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya *Intelligence Quotient (IQ)* dan *Emotion Quality (EQ)*.

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah 2012). Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat (M. S. Hasibuan 2014).

Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknolog dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan – perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki perusahaan/organisasi harus melakukan pengembangan sumber daya manusia secara pro aktif sehingga tidak terjadi keusangan kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan produktifitas (Prasetyo 2011). Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran – keluaran (*output*) dan hasil – hasil (*outcomes*) (Rahmawati 2010).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam

melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan – pelatihan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowlegde*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Havesi 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi (Prasetyo 2011).

Sumber daya manusia adalah fokus sentral dalam satu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai

visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia (Ike 2007).

Tujuan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kegiatan atau aktivitas sumber daya manusia secara umum adalah tindakan – tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Berbagai kegiatan tersebut antara lain persiapan dan penarikan, seleksi, pengembangan, dan pemeliharaan. Agar seluruh kegiatan berjalan lancar, pelaksanaan fungsi – fungsi harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bersaing adalah organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang berbasis pengetahuan (*knowledge based workers*) dan memiliki berbagai ketrampilan dan keahlian (*multiskilling workers*). Karena kualitas barang akan bergantung pada jasa dan pelayanan unsure manusia yang memiliki kecakapan.

### **2.1.3 Pengendalian Intern**

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalani oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Halim n.d.).



Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya manajemen.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, maka tujuan dari pengendalian intern adalah melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuan, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

#### 2.1.4 Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pemanfaatan adalah proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang – barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang (Supriyanto 2007). Teknologi informasi adalah penggunaan teknologi (computer, elektronik dan telekomunikasi) untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.

*Oxford English Dictionary (OED2)* edisi ke-2 dalam (Supriyanto 2007) mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk didalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Sering nama IT merupakan bagian dari kegiatan usaha yang memanfaatkan perangkat elektronik computer.

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009) dalam (Rahmawati 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, digunakan untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Rahmawati 2010).

Dalam bukunya Senn (2000) dan Simarmata (2005) mengatakan istilah IT digunakan mengacu pada suatu item yang bermacam – macam kemampuan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran data serta informasi. Komponen utamanya ada tiga, yaitu komputer (*computer*), komunikasi (*communication*), dan ketrampilan (*knowhow*).

Istilah teknologi memang lebih merujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun mengolah informasi, namun pada dasarnya masih merupakan bagian dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Teknologi informasi memang secara lebih mudah dipahami secara umum sebagai pengolahan informasi yang berbasis pada teknologi komputer yang saat ini teknologinya terus berkembang sehubungan perkembangan teknologi lain yang dapat dikoneksikan dengan komputer itu sendiri.

Pada intinya istilah teknologi informasi (*information technology-IT*) adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Pengolahan data dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah pengolahan data elektronik (*electronic data processing-EDP*), yang

didefinisikan sebagai proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa informasi dengan menggunakan computer. Data merupakan objek yang belum dan akan dilakukan pengolahan yang sifatnya masih “mentah”. Sedangkan informasi adalah data yang telah terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat yang bisa disebut informasi (Supriyanto 2007).

Ada 5 (lima) fungsi teknologi informasi menurut (Simarmata 2005)

:

**1. *Capture***

Proses penyusunan rekond aktivitas yang terperinci.

**2. *Processing***

Proses mengubah, menganalisis, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data / informasi. Seperti pengolahan data, informasi, kata, gambar dan suara.

**3. *Generation***

Proses yang mengorganisir informasi kedalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka – angka, teks, bunyi, atau gambar visual.

**4. *Storage dan Retrieval***

*Storage* adalah proses computer penguat informasi untuk penggunaan masa depan. *Retrieval* adalah proses dimana penempatan computer dan penyimpanan salinan dari atau informasi

untuk pengolahan lebih lanjut atau untuk ditransmisikan ke pengguna lain.

### 5. *Transmition*

Proses computer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi, missal :

- *Electronic Mail / E-mail*
- *Voice Messanging / Voice mail*

Salah satu kegunaan utama TI adalah bahwa perusahaan sekarang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua organisasi, nasional, dan international untuk membuat proses manajemen lebih efektif dan evisien.

### 2.1.5 Pemahaman akuntansi

Paham menurut kamus umum bahasa Indonesia mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.

Menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasil serta penyajian pelaporan.

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu, dari segi prosesnya dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu ketrampilan dalam mencatat,

menggolongkan dan meringkas transaksi – transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil – hasilnya didalam suatu laporan yang disebut sebagai keuangan (Baswier 1998).

Sedangkan dilihat dari segi fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmed Belkaowi, (1981) dalam (Baswier 1998) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan – keputusan ekonomi diantara berbagai alternative tindakan.

Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Yuliani 2010).

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dijadikan referensi dari penelitian ini yaitu :

**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul (peneliti)	Variabel	Hasil penelitian
1,	Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi (Rahmawati 2010)	X1:Sumber daya manusia X2:Pengendalian intern X3:Pemanfaatan teknologi informasi X4:Pemahaman akuntansi Y:Kualitas pelaporan keuangan	Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan keempat faktor (sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi) berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan daerah.
2,	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani 2010)	X1:Pemahaman akuntansi X2:Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah X3:Peran internal audit Y:Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen (pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit) berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan
3,	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah (Wiwik 2010)	X1:Kapasitas sumber daya manusia X2:Pemanfaatan teknologi informasi Y:Keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

4	Pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah kota dan kabupaten (Sari 2012)	X1: Sumber daya manusia X2: Pemanfaatan teknologi informasi X3: Pengendalian Intern Y : Keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh negative terhadap keterandalan LK, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan LK.
---	--	---	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

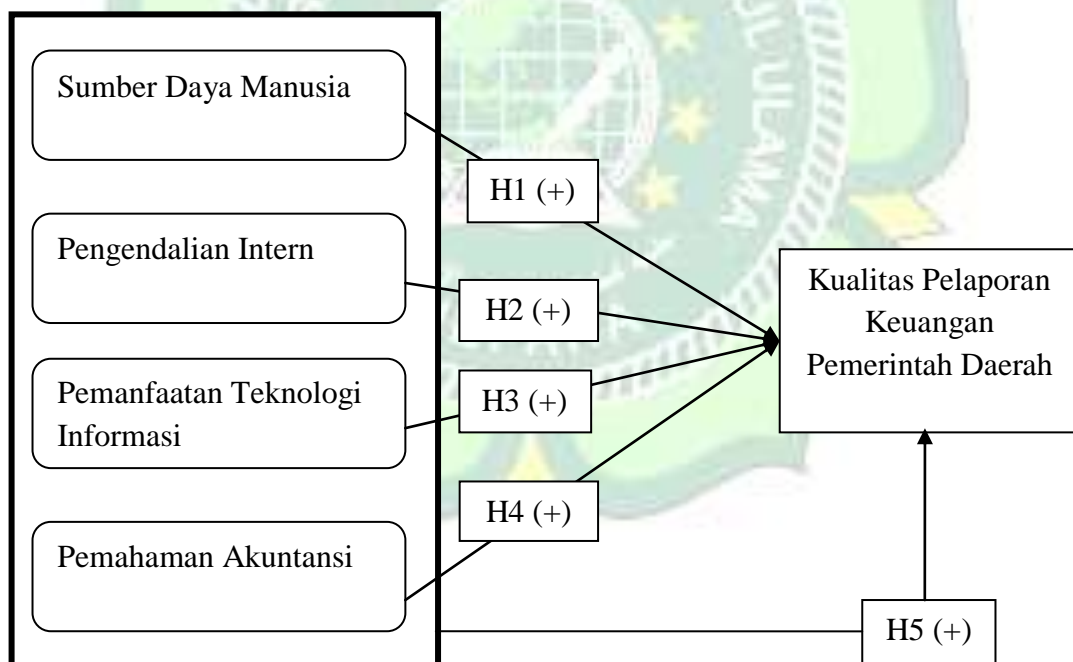
Kerangka pemikiran disini menunjukkan variabel independen yaitu sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi terhadap variabel dependen yaitu kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menilai aspek – aspek yang ada pada individu yang mengelola pelaporan keuangan pemerintah, aspek tersebut adalah sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi.

Sumber daya manusia disini yaitu kualitas orang – orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan dan menjadi perhatian utama, terutama para pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Pengendalian intern yaitu berhubungan langsung dengan pengawasan, pengamanan dan keandalan catatan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi



yaitu berhubungan dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan. Pemahaman akuntansi berarti kemampuan yang ada pada individu dalam memahami dan menyusun laporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. Untuk memperjelas pengaruh dari masing – masing variabel tersebut, maka disajikan model sebagai berikut :

**Gambar 2. 1**  
**Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen**



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian sebelumnya memang belum ada yang bertentangan antara sumber daya manusia dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian (Setiawati 2014) Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah 2012).

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Rahmawati 2010)

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan – pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Havesi 2005).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sarana – sarana yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo 2011), (Setiawati 2014) sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan. Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi – fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>1</sub> : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah*

## 2.4.2 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti 2004) dalam (Setiawati 2014).

Menurut penelitian (Prasetyo 2011) pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Arens (2008) dalam Rinaldi (2013) Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam mencegah dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliable.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>2</sub> : Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah*

### **2.4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi dalam hal ini adalah komputer akan meningkatkan apabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen – komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegritaskan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, computer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak Pujonggo (2004) dalam (Prasetyo 2011).

Menurut Jogiyanto (1995) dalam Rinaldi (2013) menjelaskan bahwa informasi yang berkualitas dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi yang berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Dari penelitian yang dilakukan (Rahmawati 2010), (Setiawati 2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>3</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah*

#### **2.4.4 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dilihat dari tujuan pelaporan keuangan adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak kedalam bentuk yang bisa dipahami. Karena pelaporan keuangan digunakan oleh pemakai internal dan pemakai eksternal untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dalam melakukan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan tersebut memenuhi

karakteristik kualitatif. Pemahaman akuntansi bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Dari penelitian (Setiawati 2014), (Rahmawati 2010) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>4</sub> : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.*

#### **2.4.5 Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Penelitian (Setiawati 2014) menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memadai, pengendalian intern yang terkendali, pemanfaatan teknologi yang optimal, serta pemahaman dalam bidang akuntansi mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para pengguna.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi (2013), (Rahmawati 2010), (Zuliarti 2012) bahwa Sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi berpengaruh

signifikan dan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kondisi sub bagian sub bagian akuntansi/tata usaha yang sudah mendukung dan juga diimbangi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Manfaat dari teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Lingkungan Pengendalian intern yang kondusif dan perilaku yang positif mampu meningkatkan kinerja seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pemahaman akuntansi menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, maka dari itu dilakukan pelatihan – pelatihan akuntansi bagi pegawai yang tidak berlatar belakang akuntansi.

Dari uraian di atas hubungan antara sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dihipotesiskan sebagai berikut :

*H<sub>5</sub> : Sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah*